

SUMBANGAN PENELITIAN ARKEOLOGI BAGI PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU

Syahrudin Mansyur¹

Abstrak

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka segala potensi yang ada harus dioptimalkan, demikian halnya bidang kebudayaan. Mengingat potensi sumberdaya budaya yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. Pemerintah dalam hal ini telah membentuk lembaga untuk mengurus kebudayaan, salah satunya adalah instansi pemerintah yang mengurus bidang arkeologi. Balai Arkeologi adalah unit pelaksana tugas Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional yang ditempatkan di daerah. Salah satu Balai Arkeologi yang dibentuk adalah Balai Arkeologi Ambon (Balar Ambon) dengan wilayah kerja yaitu Propinsi Maluku dan Maluku Utara. Balar Ambon inilah yang diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah Maluku dan Maluku Utara dalam memajukan daerahnya. Olehnya itu, sebagai instansi penelitian maka diharapkan penelitian-penelitian Balar Ambon dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah.

Tulisan ini, mencoba menguraikan manfaat penelitian arkeologi dalam arti yang seluas-luasnya. Bahwa penelitian arkeologi tidak hanya selalu berkaitan dengan pembangunan mental tetapi juga bagi pembangunan fisik. Olehnya itu, kajian-kajian dalam ilmu arkeologi perlu dikembangkan di daerah Maluku agar arkeologi mampu memberi sumbangan nyata bagi pembangunan.

Kata Kunci: Arkeologi, Penelitian, Kajian Arkeologi, Sumbangan bagi Pembangunan.

I

Esensi mendasar yang mendorong pendirian negara Republik Indonesia adalah keinginan untuk membangun suatu masyarakat yang berkeadilan sosial. Hal ini pula yang kemudian menjadi tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Lebih lanjut tentang tujuan nasional telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

¹ Staf Peneliti Balai Arkeologi Ambon

Olehnya itu, Pemerintah telah menyusun program-program pembangunan guna mencapai tujuan nasional tersebut dengan berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Salah satu langkah pemerintah pusat untuk mencapai tujuan nasional adalah program desentralisasi yaitu pelimpahan kewenangan pelaksanaan pemerintahan ke daerah. Hal ini, mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam pasal 11 Ayat 2 disebutkan bahwa “bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, peternakan, koperasi dan tenaga kerja”. Dikeluarkannya UU Otonomi Daerah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pemerintah daerah adalah pihak yang paling mengerti akan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing. Selain itu, dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Sebelum pemberlakuan otonomi daerah, semua kewenangan dan kebijakan pemerintahan di Indonesia berada di tangan pemerintah pusat. Demikian halnya dalam bidang kebudayaan yang dulunya berada di tangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dan pada tahun 2001 sesuai undang-undang otonomi daerah maka kewenangan pengembangan kebudayaan diserahkan kepada pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (pada tahun 2004 berubah menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata) adalah merumuskan kebijakan makro dan koordinasi kebijakan tersebut. Kebijakan pemerintah pusat di bidang kebudayaan menjadi panduan/ koridor bagi kebijakan dan implementasinya oleh pemerintah daerah dan sebagian lainnya diimplementasi pemerintah pusat sendiri.

Selanjutnya, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maka pemerintah mengoptimalkan semua potensi yang ada dan tentunya tetap memperhatikan aspek keseimbangan. Salah satu bidang yang diharapkan dapat memberikan sumbangan nyata dalam pembangunan adalah bidang kebudayaan. Sumbangan yang dimaksud berkaitan dengan sumberdaya budaya yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. Untuk memahami apa yang dimaksud sumberdaya budaya

perlu disebutkan tiga wujud kebudayaan seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1974), yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat; dan
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Lebih lanjut, sumberdaya budaya pada dasarnya dapat dipilah menjadi dua, yaitu berupa karya-karya budaya dalam suatu masyarakat, dan manusia-manusia yang menggerakkan kebudayaan, baik sebagai pengarah, pengambil keputusan, maupun sebagai kreator dan pelaksana (Sedyawati, 2002). Hal ini berarti dalam pengelolaan sumberdaya budaya, manusia maupun wujud budayanya tidak boleh dipisahkan karena saling berkaitan satu dengan yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disebutkan sifat-sifat sumberdaya budaya yaitu:

1. Memiliki nilai sejarah, baik lokal, regional maupun internasional
2. Mengandung nilai-nilai kepurbakalaan
3. Memiliki hubungan/keterikatan dengan perkembangan kebudayaan manusia
4. Memiliki sesuatu yang unik dan khusus
5. Tidak mungkin untuk diperbaharui.

Dengan demikian sumberdaya budaya dimaksud harus dikelola dengan baik agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pencapaian tujuan nasional. Demikian halnya dengan arkeologi sebagai bagian dari kebudayaan, karena merupakan salah satu wujud kebudayaan yaitu berkaitan dengan benda-benda hasil karya manusia sangat diharapkan perannya bagi pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

Dengan maksud tersebut Pemerintah kemudian membentuk lembaga-lembaga yang mengurus bidang kebudayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebudayaan dianggap memiliki aspek statis dan dinamis. Aspek statis berkaitan dengan benda-benda hasil budaya manusia, masalah yang utama adalah masih lemahnya pemeliharaan dan pengelolaan hasil budaya serta rendahnya apresiasi budaya dan sejarah bangsa. Sedang aspek dinamis berkaitan dengan sistem sosial budaya Indonesia, misalnya adanya gejala disintegrasi, adanya disorientasi nilai dan masih lemahnya ketahanan budaya dalam

membendung globalisasi (Rukendi, 2005). Oleh karena itu maka dibutuhkan peran pemerintah dengan melibatkan stakeholder yang lain untuk mengurus bidang kebudayaan. Stakeholder yang lain yaitu pihak swasta dan masyarakat, sehingga akan tercapai good governance dalam mengurus bidang kebudayaan.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Tim Litbang Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata memperlihatkan bahwa ada beberapa faktor yang mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Diantaranya; pola pikir (*main set*) pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) tidak sama atau sejalan dalam mengelola kebudayaan; kerjasama antar lembaga/instansi baik secara vertikal maupun horizontal masih rendah; dan tidak kalah pentingnya adalah kemauan (*good will*) pemerintah yang masih kurang dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang ditandai, misalnya pola pembangunan yang diterapkan kecenderungannya bukan untuk rakyat sehingga menimbulkan ketidak-adilan. Karena itu upaya-upaya yang tetap perlu dilakukan, antara lain adalah meningkatkan pemahaman mengenai kebudayaan melalui penyatuan pola pikir pengelolaannya mulai dari pusat sampai ke daerah, meningkatkan kerjasama antar lembaga/ instansi, perombakan balai-balai penelitian sesuai dengan potensi daerah, dan dukungan secara konkrit dari pemerintah melalui penerapan pola pembangunan yang berkeadilan (Tim Litbang Kementerian Budpar, 2003). Olehnya itu, melalui kegiatan seminar atau diskusi semacam inilah permasalahan di atas dapat diupayakan jalan keluar terbaik sehingga tercapai penyatuan pola pikir untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan.

Khusus untuk lembaga yang menangani bidang ke-arkeologi-an telah dibentuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional dan ditingkat daerah dibentuk Balai Arkeologi. Dimana telah dibentuk 10 Balai Arkeologi diberbagai wilayah di Indonesia dan untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara dibentuk Balai Arkeologi Ambon. Lembaga inilah yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memberikan sumbangan melalui penelitian-penelitian yang dilakukannya.

Demikianlah maka tulisan ini mencoba untuk memaparkan peran dan manfaat penelitian arkeologi secara luas dalam kaitannya dengan

pembangunan. Berkaitan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah maka Balai Arkeologi Ambon diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah Propinsi Maluku dan Maluku Utara dalam memajukan daerahnya. Perlu dijelaskan bahwa dalam tulisan ini penulisan sumberdaya budaya, sumberdaya arkeologi atau benda budaya digunakan berdasarkan pengertian dan konteks kalimatnya.

II

Untuk menjelaskan sumbangan penelitian arkeologi bagi pembangunan maka perlu dijabarkan mekanisme kerja arkeologi. Berikut ini akan dijabarkan tentang apa itu arkeologi, apa yang menjadi objek penelitian arkeologi, bagaimana penelitian arkeologi, dan bagaimana hakekat kerja arkeologi serta apa pula yang dimaksud dengan sumberdaya arkeologi. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diketahui manfaat penelitian arkeologi, khususnya bagi masyarakat.

Definisi sederhana yang dapat disebutkan tentang arkeologi, seperti yang dikemukakan oleh Daniel (1976), adalah “to write history from surviving material sources”. Sedang Taylor (1971), mengemukakan bahwa “Archaeology is neither history or anthropology. As an autonomous discipline, it consists of method and a set of specialized techniques for gathering or “production” of cultural information”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arkeologi adalah salah satu disiplin ilmu sosial yang menggunakan metode dan teknik khusus bertujuan untuk menjelaskan proses budaya melalui materi yang ditinggalkan oleh manusia sebagai sumber informasi.

Berangkat dari pengertian di atas maka objek penelitian arkeologi adalah segala sesuatu yang dibuat, digunakan, dan ditinggalkan oleh manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam ilmu arkeologi dikenal sebagai *artefak* yaitu benda buatan manusia yang dapat dipindahkan, *featur* yaitu benda buatan manusia yang tidak dapat dipindahkan, sedang *ekofak* yaitu benda alam yang mempunyai kaitan dengan kehidupan manusia. Lebih lanjut, artefak diklasifikasi ke dalam tiga hal; *teknofak* yaitu kelompok artefak yang memiliki konteks fungsional primer terhadap pola-pola penyesuaian manusia dengan lingkungan alam; *sosiofak* yaitu kelompok artefak yang secara langsung berkaitan dengan sistem sosial yang berlaku pada masyarakat

tertentu; dan *ideofak* yaitu kelompok artefak yang dibuat berbasis pada sistem ideologi dan agama suatu masyarakat. (Binford, 1972).

Secara sederhana, pelaksanaan penelitian arkeologi diawali dengan pengumpulan data, kemudian pengolahan data, dan selanjutnya memberikan interpretasi atau melakukan eksplanasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tehnik khusus yaitu dapat dengan melakukan survei maupun tehnik yang lebih mendalam yaitu ekskavasi/ penggalian. Data yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang proses budaya. Berkaitan dengan dengan tehnik perolehan data melalui penggalian Piggot (1959), mengemukakan bahwa seorang arkeolog tidak hanya menggali untuk memperoleh benda budaya akan tetapi menggali makna yang terkandung dibalik benda budaya tersebut. Kemudian dilakukan pengolahan data menyangkut benda budaya tersebut. Mulai dari apa nama benda tersebut, terbuat dari apa, bentuknya bagaimana, siapa pembuatnya, apa fungsinya, berasal dari mana, kapan dibuat, serta informasi awal lainnya tentang benda tersebut. Setelah dilakukan pengolahan data maka tahap akhir yaitu melakukan interpretasi atau eksplanasi yang bertujuan untuk menarik generalisasi proses budaya.

Tujuan akhir dari penelitian arkeologi seperti dikemukakan oleh Binford (1972), yaitu:

1. Merekonstruksi sejarah kebudayaan
2. Merekonstruksi tingkah laku
3. Menggambarkan proses perubahan budaya

Tujuan ini berkaitan dengan aspek akademis penelitian arkeologi, sedang tujuan akhirnya yaitu pemanfaatannya dari aspek ideologi, ekonomi dan diplomasi. Untuk memahami hal ini, perlu dikemukakan hakekat penelitian arkeologi.

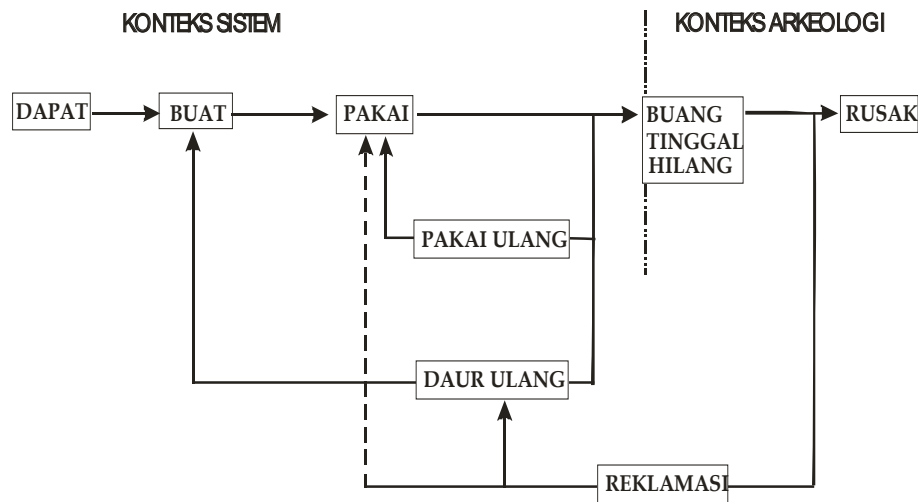
Apakah hakekat kerja arkeologi ? Tanudirdjo (2004), mengemukakan bahwa kerja arkeologi sebenarnya sama dengan pemulung. Pernyataan ini berangkat dari kerangka pikir M.B. Schiffer (1976; 1985) tentang proses transformasi budaya. Dalam kerangka pikir ini, ada dua konteks utama yang dapat menjelaskan keberadaan sumberdaya budaya, yaitu konteks sistem dan konteks arkeologi. Konteks sistem adalah lingkungan budaya yang masih berlangsung. Dalam konteks ini, sumberdaya budaya masih berperan aktif dan dipergunakan oleh masyarakat. Konteks arkeologis adalah lingkungan

tempat sumberdaya budaya (baik yang *tangible* maupun yang *intangible*) sudah tidak digunakan lagi, sehingga lebih tepat disebut sumberdaya arkeologi (Tanudirjo, 2004). Dengan demikian, untuk dapat mengungkap makna dibalik sumberdaya arkeologi yang ada saat ini harus memahami konteks sistemnya.

pembangunan khususnya di daerah Maluku akan dijelaskan pada bagian lain tulisan ini.

Berkenaan dengan sumbangan penelitian arkeologi bagi pembangunan daerah Maluku, maka ada baiknya dipaparkan tentang gambaran umum dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai oleh Balai Arkeologi Ambon sebagai lembaga penelitian arkeologi yang membawahi wilayah Maluku dan Maluku Utara.

PROSES TRANSFORMASI



Skema transformasi benda budaya menurut Schiffer

Dalam ilmu arkeologi dikenal berbagai macam kajian untuk memberikan penjelasan tentang proses budaya, diantaranya etnoarkeologi, kajian keruangan, arkeologi kota, arkeologi perilaku, manajemen sumberdaya arkeologi, dan kajian arkeologi lainnya. Kajian-kajian ini merupakan perkembangan arkeologi secara keilmuan guna mencapai tujuan penelitian. Lebih lanjut tentang manfaat dan kegunaan masing-masing kajian tersebut dalam memberikan sumbangan bagi

III

Balai Arkeologi Ambon dibentuk pada tahun 1995, selama dibentuknya Balai Arkeologi Ambon telah melaksanakan berbagai penelitian di wilayah kerjanya yaitu Propinsi Maluku. Pada tahun 2000 propinsi Maluku dimekarkan menjadi dua propinsi yaitu Maluku dan Maluku Utara. Dibentuknya Balai Arkeologi di wilayah ini mengingat potensi sumberdaya arkeologi yang dimiliki daerah ini. Sebelum dibentuk, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional telah melaksanakan beberapa kali penelitian sebagai persiapan dibentuknya Balai Arkeologi. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya dilaksanakan di Maluku Utara, Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, rentang waktu penelitian dilaksanakan antara tahun 1970-an dan tahun 1994-1995. Berdasarkan hasil penelitian tersebut berhasil diidentifikasi sumberdaya arkeologi periode Prasejarah di pulau Halmahera, pulau Seram dan pulau Kei; dan periode Islam di Maluku Utara. Hasil-hasil penelitian inilah yang kemudian mendasari dibentuknya Balai Arkeologi Ambon.

Hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Balai Arkeologi Ambon sendiri diantaranya berhasil mengidentifikasi sumberdaya arkeologi yang ada di wilayah ini. Hingga tahun 2005 Balai Arkeologi Ambon telah melaksanakan 29 kali penelitian (Ririmase, 2006). Dan pada tahun 2006, Balai Arkeologi Ambon melaksanakan enam kali penelitian. Dengan demikian, selama 11 tahun sejak dibentuknya, Balai Arkeologi Ambon telah melaksanakan 35 kali penelitian. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut berhasil diidentifikasi situs-situs arkeologi diantaranya periode prasejarah sebanyak 21 situs, periode klasik sebanyak 2 situs, periode Islam sebanyak 6 situs, dan situs periode kolonial sebanyak 6 situs. Periode prasejarah diantaranya berupa lukisan gua, dolmen dan menhir yang merupakan situs megalitik, serta situs pemukiman baik yang masih dihuni maupun yang telah ditinggalkan.

Periode Klasik berupa indikasi tradisi pemujaan bergaya klasik, selain itu ditemukan pula arca perwujudan Dewi di Ternate Maluku Utara. Periode Islam berupa bekas pemukiman, Masjid, Istana (Kadato), dan makam-makam kuno. Sedang, periode Kolonial berupa bangunan-bangunan monumental seperti benteng, gedung perkantoran, rumah tinggal, gereja.

IV

Keberhasilan penelitian arkeologi terkadang diarahkan untuk kepentingan-kepentingan politik masa kini. Kita tentu masih ingat Hitler seorang diktator awal abad XX yang berkuasa di Jerman. Pada saat itu penguasa Jerman memanfaatkan penelitian arkeologi dengan mengarahkan kesimpulan penelitiannya pada keunggulan bangsa Aria (ras asli Jerman). Oleh karena itu, menurut mereka bangsa Aria harus dipertahankan keberadaannya di muka bumi dan memusnahkan ras lain. Diktator Jerman pada saat itu bahkan membangun kamp konsentrasi untuk menghilangkan ras manusia yang dianggap tidak produktif. Sedang di Cina, hasil penelitian berupa artefak-artefak dengan tehnik pengerjaan yang unggul dijelaskan sebagai hasil kerja kaum (kelas) pekerja. Kesimpulan ini kemudian dimanfaatkan pemerintah Cina untuk memantapkan ideologi komunis.

Selain pemanfaatan hasil-hasil penelitian arkeologi untuk kepentingan politik, penelitian arkeologi dapat juga digunakan untuk memahami budaya masa kini. Eropa misalnya, tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan negara-negara Eropa menjadi negara maju saat ini merupakan perjalanan panjang budaya mereka di masa lalu. Interaksi-interaksi – perdagangan, penyebaran budaya, atau peperangan – di antara kelompok-kelompok penduduk di benua Eropa dapat mendorong terjadinya perubahan sosial (Cunliffe dalam Olson, 2004:227). Faktor lain kemajuan kultural Eropa pada zaman batu adalah iklim (Renfrew dan Boyle, *ibid*). Interaksi antara penduduk Eropa dan iklim di Eropa masa lalu membuat penduduk Eropa lebih kreatif dalam beradaptasi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh lain adalah Jepang, kemajuan negara mereka saat ini berkat budaya kerja mereka yang sangat terkenal sejak dahulu dengan etos kerja yang tinggi.

Uraian di atas merupakan peran tanggung jawab arkeolog dalam

mengelola sumberdaya budaya. Tanggung jawab ini berkaitan dengan pengetahuan yang dimikinya, sehingga dapat bergerak ke dua arah yaitu; mengembangkan ilmu pengetahuan, baik segi teori dan metodologi; dan mengemas informasi ilmiah secara menarik. (Sedyawati, 2002). Dengan demikian, hasil-hasil penelitian arkeologi yang telah dilakukan di Maluku perlu dikemas dengan baik agar dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat telah menggariskan kebijakan di bidang kebudayaan, yaitu (1) mengembangkan dan membawa kebudayaan nasional yang bersumber dari budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa; (2) merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas kehidupan ekonomi, praktik hukum dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan berbudaya masyarakat, dan (3) mengembangkan sikap-sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan. Dan untuk bidang pariwisata, yaitu (1) menyusun kebijakan makro di bidang pariwisata termasuk standar pemberian ijin dan persyaratan kualifikasi usaha jasa pariwisata; (2) melakukan promosi nasional dan internasional; (3) melakukan pembinaan dan bimbingan SDM; (4) menyusun pedoman, standar dan prosedur dalam produk dan usaha jasa pariwisata serta pemasaran wisata. Untuk mencapai apa yang digariskan tersebut, mekanisme yang ditempuh adalah dengan:

1. Mengembangkan muatan lokal tentang kebudayaan untuk seluruh jenjang pendidikan.
2. Pengembangan produk kebudayaan yang sesuai dengan identitas daerah.
3. Perubahan paradigma pembangunan industri budaya pariwisata dari industri yang berbasis sumber daya menjadi industri yang berbasis pengetahuan.
4. Memposisikan pengembangan SDM sebagai prioritas utama untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

5. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata di daerah yang relatif belum berkembang untuk mengundang investasi sektor-sektor lain (Tim Litbang Kementerian Budpar, 2003).

Demikianlah, kebijakan-kebijakan yang ada tersebut merupakan implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Implementasi UU berkenaan dengan kewenangan pemerintah pusat di bidang kebudayaan dan pariwisata menyusun kebijakan secara makro sedang pemerintah daerah melaksanakan kebijakan makro tersebut sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Tujuan penelitian arkeologi yaitu melakukan identifikasi sumberdaya arkeologi serta makna yang terkandung dibalik sumberdaya arkeologi tersebut, dan bermuara pada pengelolaan dan pemanfaatan.. Cleere (1990), menjelaskan bahwa kegunaan sumberdaya arkeologi itu untuk jati diri (*cultural identity*) yang dikaitkan dengan fungsi pendidikan sebagai pengetahuan bagi masyarakat, manfaat ekonomis lewat kepariwisataan, dan fungsi akademis untuk menjaga dan menyelamatkan basis data tentang sumberdaya tersebut.

Arti penting sumberdaya arkeologi bagi kebudayaan bangsa khususnya untuk memupuk rasa kebangsaan nasional dan memperkokoh kesadaran jati diri bangsa. Kesadaran jati diri bangsa banyak dipengaruhi oleh pengetahuan masa lalu, sehingga keberadaan kebangsaan masa kini dan proyeksinya ke depan dapat bertahan pada ciri khasnya sebagai suatu bangsa yang tetap berpijak pada landasan filsafat dan budayanya sendiri (Sunarya, 2005). Hal ini berarti, mengetahui dan memahami budaya masa lalu mampu mempertahankan bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di sisi lain, keberagaman budaya bangsa Indonesia, bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Seperti diketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku dengan budayanya masing-masing. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik bisa menjadi penyebab disintegrasi bangsa. Disinilah arkeologi dapat mengambil peran karena mampu “meneropong” masa lalu. Melalui penelitian yang dilakukan, arkeologi dapat menarik generalisasi budaya masa lalu. Salah satu contohnya adalah penyebaran budaya megalitik berupa menhir, dolmen, punden berundak, dan sebagainya bisa ditemui di seluruh pelosok nusantara. Hal ini berarti jauh sebelum datangnya pengaruh agama, telah ada sistem religi yang dikenal oleh nenek moyang bangsa Indonesia.

Dalam konteks lokal keberagaman suku, agama, dan ras di Maluku telah terbukti dapat menimbulkan gejolak sosial, sehingga menyebabkan hancurnya tatanan sosial yang telah terbangun berabad-abad lalu. Hal ini tidak seharusnya terjadi jika kita mengetahui dan memahami sejarah budaya yang pernah berkembang di Maluku. Jauh sebelum datangnya agama, masyarakat Maluku telah tersebar dalam komunitas berupa negeri-negeri (kampung) dengan sistem religi yang universal yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Hal ini disimbolkan dengan adanya batu meja (dolmen) di masing-masing negeri.

Persoalan disintegrasi bangsa merupakan masalah bersama dan arkeologi dapat mengambil peran. Sulistyanto (2001), menyebut bahwa akuntabilitas terhadap publik merupakan kewajiban yang mendesak dilakukan secara sistematis, baik melalui jaringan perangkatnya maupun sasaran objeknya. Hal ini berarti arkeologi perlu merumuskan pensosialisasian nilai-nilai secara efektif, kondusif dan yang relevan dengan permasalahan masyarakat melalui berbagai jalur komunikasi massa. Lebih lanjut, disebutkan bahwa penelitian arkeologi telah diarahkan pada permasalahan tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam lima tema penelitian Arkeologi Indonesia. Dimana salah satu tema tersebut berbunyi “proses dan kelangsungan integrasi budaya dalam lingkup dan wawasan nasional”. Demikianlah, maka revitalisasi nilai-nilai dibalik sumberdaya arkeologi menjadi pekerjaan wajib yang harus dilakukan pada saat ini, jika tidak mau dikatakan sebagai kelompok yang pasif terhadap permasalahan bangsa (Sulistyanto, 2001).

Berkaitan dengan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan baik oleh Balai Arkeologi Ambon maupun lembaga-lembaga yang membidangi kebudayaan di Maluku dan Maluku Utara. Hendaknya dikemas dengan baik agar dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat untuk memahami budaya mereka. Lebih dari itu, sudah saatnya hasil-hasil penelitian tersebut dijadikan muatan lokal dalam kurikulum pendidikan di Maluku maupun Maluku Utara.

Hasil penelitian arkeologi bermuara pada identifikasi sumberdaya arkeologi, sumberdaya ini yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan praktis masa kini. Kepentingan praktis dari sisi ekonomi berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya arkeologi sebagai objek wisata. Dalam ilmu arkeologi sendiri pemanfaatan

sumberdaya arkeologi sebagai objek wisata mengacu pada satu kajian yaitu Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi. Perlunya pengelolaan ini, mengingat sumberdaya arkeologi bersifat; tidak teperbaharui (*non-renewable*), terbatas (*finite*), tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula (*irreversible*) dan khas (*contextual*). Pemanfaatan sumberdaya arkeologi (situs) juga harus melibatkan masyarakat sekitarnya secara aktif karena mereka adalah pemilik sehingga mempunyai ikatan kultural dengan situs tersebut. Pelibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada keikutsertaan mereka menjaga, memelihara, atau sekedar membuka usaha di lokasi objek wisata. Lebih dari itu, mereka harus dilibatkan pada penentuan kebijakan dalam pengelolaan objek wisata tersebut. Oleh karena itu, diperlukan metode khusus untuk mewujudkan hal ini, metode FGD (*Focus Group Discusson*) merupakan salah satu metode yang dapat diterapkan (Sulistyanto, 2005 dan Handoko, 2006). Pada dasarnya metode ini mengumpulkan masyarakat dalam satu forum diskusi untuk memecahkan suatu masalah, peran arkeolog cukup menjadi mediator dengan mengarahkan jalannya diskusi agar diperoleh solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Penerapan metode ini sejalan dengan pemikiran Tanudirdjo (2000), menyebutkan dalam pengelolaan sumberdaya budaya arkeolog hendaknya menjadi mediator yang dapat menengahi setiap konflik dan memberikan arah penyelesaian yang bersifat “win-win solution”.

Selain manfaat yang bersifat pembinaan mental seperti yang diuraikan di atas, penelitian arkeologi melalui kajian-kajian lain dapat memberi sumbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Bagian berikut akan diuraikan beberapa kajian dalam ilmu arkeologi yang bermanfaat untuk mengungkap fenomena-fenomena sosial.

V

Pada tahun 1973-1975, seorang arkeolog Amerika Bill Rahtje melakukan penelitian teradap pola perilaku (dalam arkeologi penelitian seperti ini dikenal dengan “behavioral archaeology”) warga kota di negara bagian Arizona dan sekitarnya. Dalam penelitiannya ia mengumpulkan berkarung-karung sampah serta merinci isinya. Berdasarkan pengamatan terhadap sampah-sampah tersebut, Rahtje berhasil mengungkap hal-hal yang di luar dugaan sebelum dilakukan penelitian. Ternyata, dari penghitungan jumlah kaleng bir dapat

mengungkap volume alkohol yang dikonsumsi jauh lebih banyak daripada yang diakui secara resmi. Demikian pula halnya dengan kenyataan lain dapat diungkap melalui pengkajian terhadap sampah. Bahwa selama masa kekurangan daging, orang cenderung lebih banyak membuangnya daripada waktu-waktu biasa sebagai akibat dari penimbunan yang berlebihan. Dengan demikian, analisis sosiologi secara utuh tidak dapat dibatasi pada data yang dikumpulkan melalui wawancara saja. (Magetsari, 2000). Penelitian yang dilakukan Rahtje tersebut berhasil mengungkap masalah sosial dan ekonomi lainnya, serta berhasil merumuskan ‘dalil’ yang menyatakan bahwa harga yang tidak stabil akan menyebabkan lebih banyak barang-barang yang terbuang (Najemain, 2002).

Demikian halnya dengan penelitian C. Fred Blake yang dipublikasikan pada tahun 1981. Blake mengumpulkan isi dan maksud corat-coret yang terdapat pada dinding bangunan sekitar kampusnya di Universitas Hawaii. Selanjutnya, Blake melakukan kaji silang antara variabel isi corat-coret dan etnis sasaran. Berdasarkan kajian inilah disimpulkan bahwa corat-coret itu merupakan cerminan ketegangan etnis yang tersembunyi yang ada di negara bagian itu (Ibid).

Di Indonesia, penelitian arkeologi dengan fokus kajian budaya masa kini dilakukan di daerah Kasongan di kota Yogyakarta tentang perajin gerabah (Atmosudiro dan Tanudirdjo, 1987, *ibid*). Penelitian yang dilakukan berusaha mencari penjelasan alternatif terhadap perubahan sosial yang terjadi di kalangan perajin gerabah di empat desa di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh informasi bahwa perubahan yang mencolok antara perajin wanita dan perajin pria. Hal ini terjadi karena perajin pria mendapat pengetahuan baru tentang teknologi pembuatan gerabah dari seniman yang berasal dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat. Sebelum mendapat pengetahuan tentang teknologi pembuatan gerabah kaum pria bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang kecil, sedang kaum wanita adalah perajin gerabah secara turun temurun dan mendapat penghasilan yang lebih baik. Namun setelah itu, gerabah hasil perajin pria langsung merebut pasar tidak hanya dalam negeri tetapi juga luar negeri, sehingga meningkatkan pendapatan kaum pria secara mencolok. Selain dampak positif, hal ini pun berdampak negatif pada peran wanita dalam keluarga (Tanudirdjo, 1993, *ibid*).

Selain itu, Tanudirdjo pada Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi (EHPA) tahun 2006 memaparkan hasil penelitian arkeologi dibantu oleh disiplin ilmu lain yang mengkaji materi budaya masa kini yang telah terbit dalam bentuk buku. Diantaranya; hasil penelitian arkeologi yang berhasil memberikan penjelasan tentang “pesta” yang dianggap sebagai fenomena sosial masa kini; arkeologi memberikan penjelasan tentang konsumerisme; arkeologi memberikan penjelasan untuk memahami agama-agama di dunia; arkeologi membantu memahami kapitalisme; serta buku tentang sejarah manusia sejak awal munculnya pertanian (Tanudirdjo, 2006).

Hasil kajian yang diuraikan di atas merupakan contoh penelitian yang dilakukan baik di luar negeri sebagai sumber ilmu pengetahuan, maupun di dalam negeri. Penelitian-penelitian tersebut berusaha memberikan gambaran kepada publik bahwa ilmu arkeologi telah merambah kajian budaya masa kini. Hal ini, sekaligus memberi gambaran bahwa ilmu arkeologi tidak hanya mampu memberi sumbangan pada pembangunan rohani sebagaimana yang tergambar melalui makna yang ada di balik proses budaya masa lalu. Arkeologi melalui kajian budaya masa kini dapat juga memberi sumbangan dalam mengungkap pola perilaku masyarakat masa kini. Hasil kajian ini sekaligus mampu memberi jawaban atas permasalahan terbesar arkeologi saat ini yaitu “Apa sumbangan nyata penelitian arkeologi bagi masyarakat yang selama ini masih terlalu abstrak untuk dijabarkan”. Pertanyaan seperti ini selalu muncul dikalangan umum yang masih awam akan istilah arkeologi. Dapat dipahami bahwa hasil-hasil penelitian arkeologi selama ini masih bermuara pada tujuan akademik saja yaitu bagaimana menjelaskan atau merekonstruksi budaya masa lampau. Tentu saja, sebagai ilmu sosial arkeologi selalu berusaha memberi sumbangan dalam kaitannya dengan makna di balik perilaku masyarakat melalui benda budaya yang ditinggalkannya, baik masa lalu maupun masa kini.

Selain kajian “behavioral archaeology” seperti yang digambarkan di atas, kajian-kajian lain dalam ilmu arkeologi dapat juga memberi sumbangan nyata dalam kaitannya dengan pembangunan. Kajian lain yang dimaksud diantaranya:

- Etnoarkeologi, kajian ini mencoba memahami tradisi yang masih berlangsung saat ini dan diyakini sebagai tradisi berlanjutan dari masa lalu. Contoh yang dapat dikemukakan adalah tradisi pembuatan

perahu yang mulai hilang. Dahulu, masyarakat Maluku dikenal sebagai pejuang yang gigih melawan penjajah dengan armada korakora yang kuat. Hal ini membuktikan bahwa teknologi pembuatan perahu sejak jaman dulu cukup maju. Akan tetapi, saat ini sulit menjumpai tradisi pembuatan perahu tradisional di daerah ini. Dengan melakukan kajian terhadap tradisi pembuatan perahu, tentunya hal ini dapat dijadikan acuan oleh masyarakat Maluku untuk mengeksplorasi wilayah maritim mereka.

- Arkeologi kota, kajian ini berusaha melihat sejarah perkembangan kota, mulai dari tinggalan fisik baik berupa bangunan maupun infrastruktur lain yang telah membentuk kota, kecenderungan arah perkembangan kota hingga faktor yang melatari perkembangan kota. Kajian seperti ini dapat dijadikan acuan bagi pengambil kebijakan dalam mengembangkan sebuah kota.
- Manajemen Sumberdaya Arkeologi, kajian ini merupakan kajian yang paling populer dikalangan arkeolog karena dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan sumberdaya arkeologi menjadi objek wisata. Alasan lain adalah keberhasilan dalam manajemen sumberdaya arkeologi ini dapat memberikan devisa bagi pemerintah. Sedang bagi masyarakat sekitarnya dapat meningkatkan taraf hidup dari sisi ekonomi.
- Tehnoarkeologi, kajian ini selalu dikedepankan dalam wacana konservasi sumberdaya arkeologi berupa bangunan baik secara tunggal maupun menyeluruh. Tehnoarkeologi mengkaji tentang kondisi fisik sebuah bangunan yang akan dikonservasi, diantaranya sifat bahan bangunan, kerusakan yang terjadi, bagaimana mengatasinya, serta tindakan khusus apa yang akan ditempuh guna mempertahankan fisik sebuah bangunan. Kajian ini sering disebut dengan Studi Teknis Arkeologi.

PENUTUP

Demikianlah, pemaparan di atas memberikan pemahaman kepada kita tentang peran arkeologi dalam pembangunan. Demikian pula penelitian-penelitian arkeologi yang telah dilaksanakan di daerah ini dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah Maluku maupun Maluku Utara. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan beberapa poin yaitu:

1. Pembangunan yang sedang digalakkan bertujuan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UUD 1945. Oleh karena itu pemerintah berusaha mengoptimalkan segala potensi yang ada termasuk bidang kebudayaan. Hal ini, mengingat keanekaragaman budaya yang kita miliki sehingga sumberdaya budaya yang tersebar di seluruh nusantara dapat dimaksimalkan dengan tetap mengingat aspek keseimbangan agar tetap lestari.
2. Arkeologi merupakan salah satu bidang kebudayaan yang berhubungan dengan aspek tinggalan budaya yang berwujud materi. Oleh karena itu, pemerintah telah membentuk lembaga yang dapat mengurus sumberdaya arkeologi termasuk Balai Arkeologi agar sumberdaya arkeologi dapat bermanfaat bagi pembangunan.
3. Berdasarkan penelitian arkeologi yang telah dilakukan membuktikan bahwa wilayah Maluku maupun Maluku Utara sarat dengan sumberdaya arkeologi. Potensi arkeologis yang dimiliki meliputi periodisasi budaya yang pernah ada dan berkembang yaitu; periode Prasejarah, Klasik, Islam dan Kolonial.
4. Sejalan dengan tujuan penelitian arkeologi maka dapat dikemukakan beberapa manfaat penelitian dalam kaitannya dengan pembangunan daerah, yaitu; (1) dimaknai sebagai unsur pemersatu bahwa perjalanan budaya di Maluku memiliki kesamaan dengan budaya-budaya lain di nusantara; (2) dijadikan sebagai pengetahuan bagi masyarakat dalam memahami sejarah budaya yang pernah ada dan berkembang di Maluku; (3) menjadi acuan dasar bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sumberdaya arkeologi sebagai Objek Wisata.
5. Kajian arkeologi tidak hanya terfokus pada hasil budaya masa lalu yang bermanfaat untuk pembinaan mental, lebih dari itu arkeologi sekaligus mampu merambah hasil budaya masa kini. Oleh karena itu, kajian arkeologi dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial masa kini, sehingga arkeologi mampu memberi sumbangan yang lebih nyata.

Agar sumberdaya arkeologi yang kita miliki dapat berdayaguna dalam kaitannya dengan pembangunan daerah maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1. Maluku adalah wilayah yang sarat akan sumberdaya arkeologi, oleh karena itu sudah saatnya stakeholder dalam bidang kebudayaan mengemasnya menjadi informasi yang menarik agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Pengemasan informasi kebudayaan di Maluku berkaitan dengan wacana muatan lokal yang akan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di Maluku.
2. Sudah saatnya Balai Arkeologi Ambon bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengkajian terhadap sumberdaya arkeologi yang ada di daerah ini agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini berkaitan dengan sumberdaya arkeologi yang dianggap potensial untuk dikembangkan, baik sebagai objek wisata maupun sebagai kajian untuk menyusun sejarah budaya Maluku.
3. Khusus untuk sumberdaya arkeologi, menjadi tugas utama Balai Arkeologi Ambon untuk mempopulerkan istilah arkeologi. Hal ini karena, kepedulian masyarakat terhadap sumberdaya arkeologi serta manfaatnya akan lebih dirasakan jika masyarakat memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan arkeologi dan sumberdaya arkeologi.
4. Hendaknya pada setiap penelitian Balas Ambon mencantumkan hal-hal lain tentang situasi, kondisi dan potensi lain daerah sekitar situs agar pemda dapat memperoleh informasi tambahan tentang wilayahnya, ini mengingat sulitnya medan (alam) Maluku yang terdiri dari kepulauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambary, M. H. 1998
Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia, Jakarta: PT. LOGOS Wacana Ilmu.
- Binford, R. L. 1972
An Archaeological Perspective, New York: Seminar Press.
- Handoko, W. 2006
Pendidikan Arkeologi, Merentang Jalan Harmonisasi: Renungan untuk Maluku, **Kapata Arkeologi, Vol.1 No.1 Agustus 2006. ISSN: 1858-4101**. Ambon: Balai Arkeologi Ambon.
- Koentjaraningrat, 1974
Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Najemain, 2002
Perspektif dalam Behavioral Archaeology, **WalennaE, Vol. V No. 8 Juni 2002. ISSN 1411-0571**. Makassar: Balai Arkeologi Makassar.
- Olson, S. 2004
Mapping Human History: Gen Ras dan Asal-Usul Manusia. Jakarta: Penerbit PT Serambi Ilmu Semesta.
- Magetsari, N. 2000
Nilai Lama Menatap Masa Depan, **Mencermati Nilai Budaya Masa Lalu dalam Menatap Masa Depan**. Jakarta: Proyek Peningkatan Penelitian Arkeologi Jakarta.
- Ririmase, M. 2006
Jejak dan Prospek Penelitian Arkeologi di Maluku, **Kapata Arkeologi, Vol.1 No.1 Agustus 2006. ISSN: 1858-4101**. Ambon: Balai Arkeologi Ambon.

- Rukendi, C. 2005
Perluakah Negara Mengurus Kebudayaan, **JKP Jurnal Kebudayaan dan Pariwisata Volume XII Tahun 2005. ISSN: 1410-2463**. Jakarta: Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
- Sedyawati, E. 2002
Pembagian Peranan dalam Pengelolaan Sumberdaya Budaya, **Manfaat Sumberdaya Arkeologi untuk Memperkokoh Integrasi Bangsa**. I Made Sutaba dkk (ed). Denpasar: Ikatan Ahli Arkeologi (IAAI) Komda Bali
- Sulistiyanto, B. 2001
Strategi Pemanfaatan Data Arkeologi dalam Upaya Menghadapi Disintegrasi Bangsa, **Naditira Widya. Edisi Khusus No. Juni 2001. ISSN: 1410-0932**. Banjarmasin: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- _____, 2006
Penerapan Metode Focus Group Discussion dalam Penelitian Arkeologi Publik, **Arkeologi dari Lapangan ke Permasalahan**. Bandung: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) Komda Jawa Barat-Banten.
- Sunarya, N.I. 2005
Pemberdayaan Lembaga Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi di Bali, **Khasanah Arkeologi: Pemanfaatan Sumberdaya Arkeologi**. I Made Sutaba, APU. Dkk (ed). Denpasar: Ikatan Ahli Arkeologi Komda Bali.
- Tanudirdjo, D.A. 2000
Reposisi Arkeologi dalam Era Global. **Buletin Cagar Budaya, Vol. 1 No. 2 Juli 2000 (Suplemen). H. 11-26**.

_____, 2004

Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi : Sebuah Pengantar.
Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UGM.
Yogyakarta. Bahan Diskusi untuk Pelatihan Pengelolaan
Sumber Daya Arkeologi di Trowulan.

_____, 2006

Pengembangan – Penelitian Arkeologi di Masa Depan.
Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta.
Bahan presentasi untuk Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi
2006. Bandung, 14 – 18 September 2006. (TT)

Tim Litbang Kementerian Budpar, 2003

*Penelitian Pelaksanaan Peran Pemerintah di Bidang
Kebudayaan dan Pariwisata dalam Rangka Otonomi
Daerah. Laporan Penelitian Tim Litbang Kementerian
Budpar.* Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.